

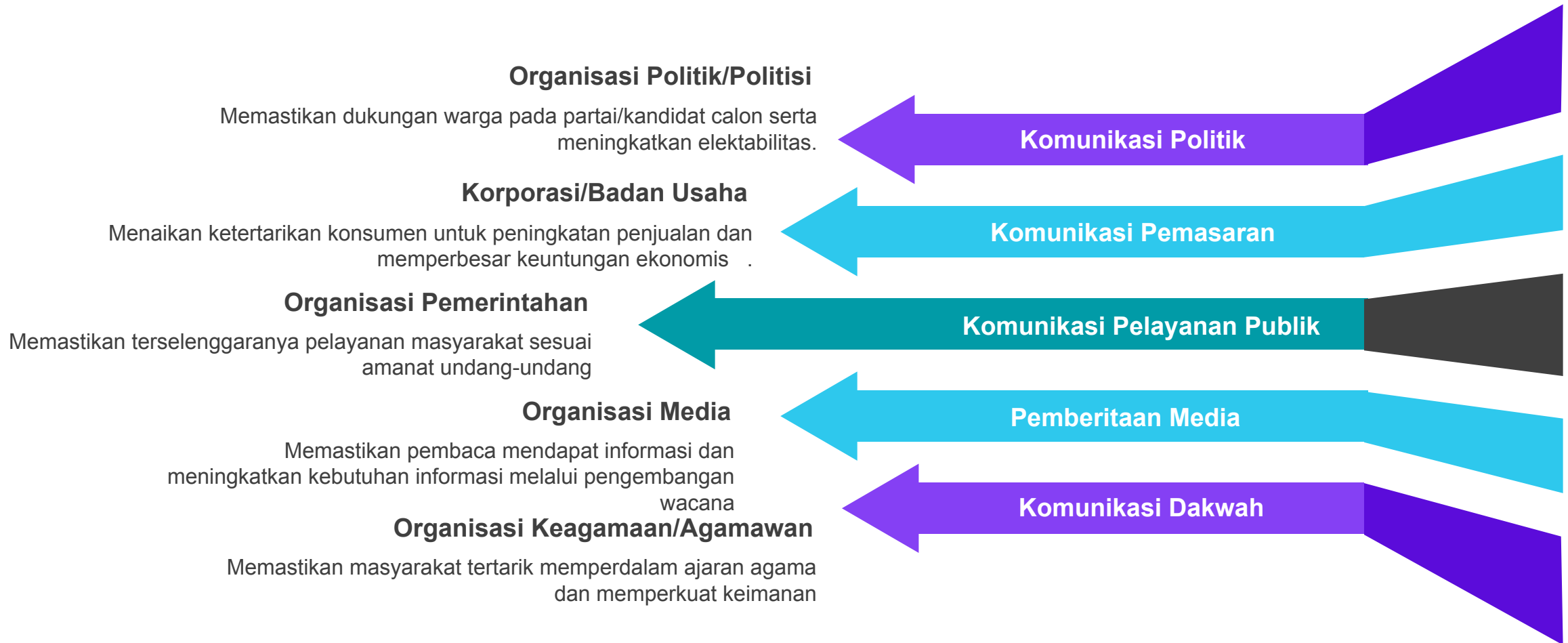


Strategi Komunikasi Publik Pemda

Diskominfo Eks Karisidenan Surakarta dan Kedu, 16 Maret 2022

Oleh: Nur Imroatus S. M.Hum

Dinamika Komunikasi Publik



Dalam praktiknya, setiap organisasi bisa saling beririsan dan mempengaruhi satu sama lain. Sehingga, komunikasi publik yang dilakukan Pemda harus kuat memegang kode/tujuan utamanya

Manajemen Komunikasi Publik Pemda

Merrespons Masalah dan Mempublikasikannya

01

- Monitoring masalah yang disuarakan masyarakat di berbagai medium, seperti: medsos, media online, lapor, dll
- Mempublikasikan respons yang telah dilakukan
- Memproduksi publikasi dengan framing responsif.

Mengedepankan Publikasi Kinerja dan Program Prioritas

02

- Memperbanyak konten kinerja dan mengurangi konten seremoni
- Monitoring kesesuaian publikasi dengan RPJMD dan Visi Misi Pimpinan
- Memproduksi konten dengan mengacu pada program prioritas dan tidak mudah ikut arus isu yang sedang ramai/viral.

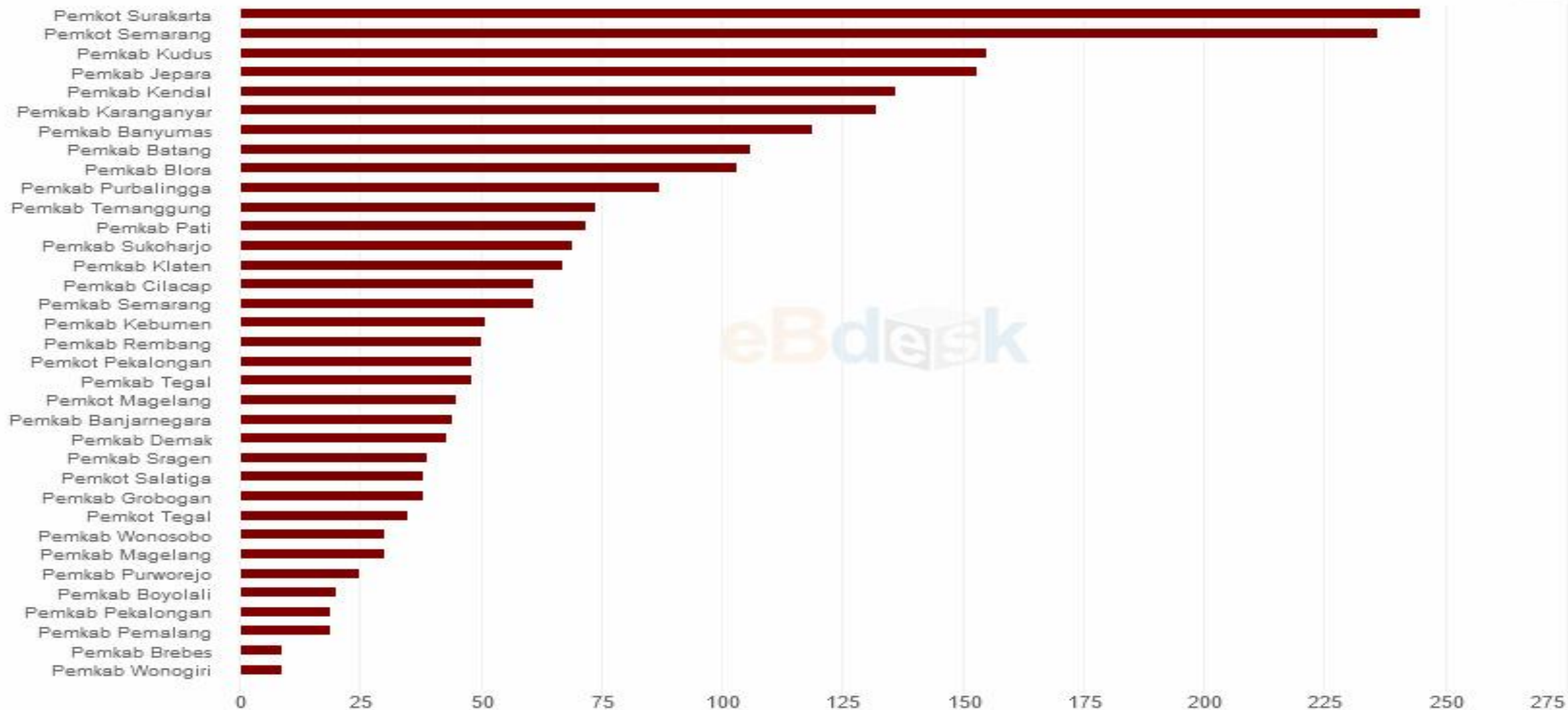
Meningkatkan Progresifitas Jumlah Ekspos

03

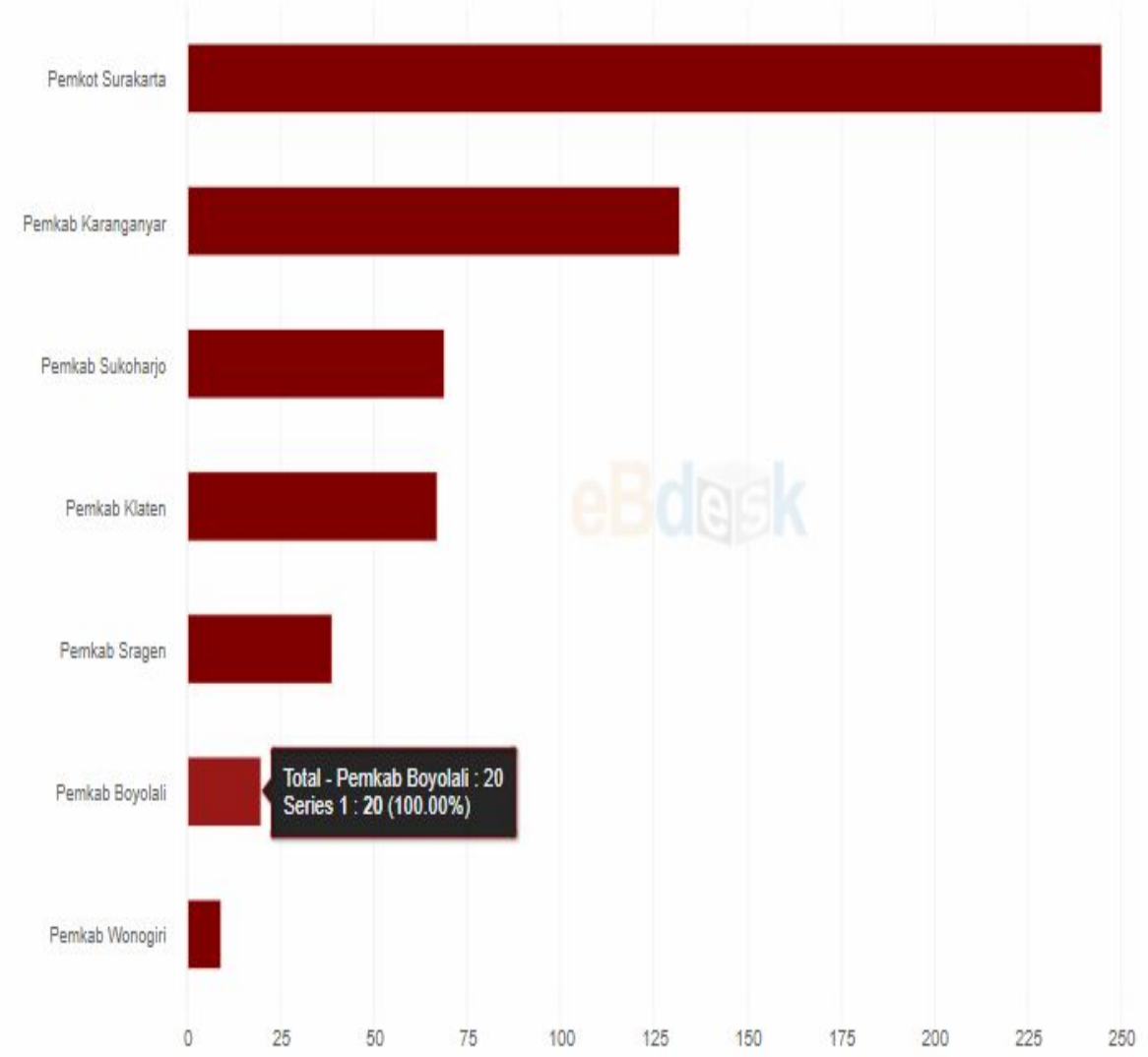
- Meningkatkan jumlah konten/publikasi di berbagai saluran media informasi publik
- Monitoring grafik ekspos OPD dan kepala daerah secara rutin.
- Menetapkan standar minimum publikasi/pembuatan konten harian.



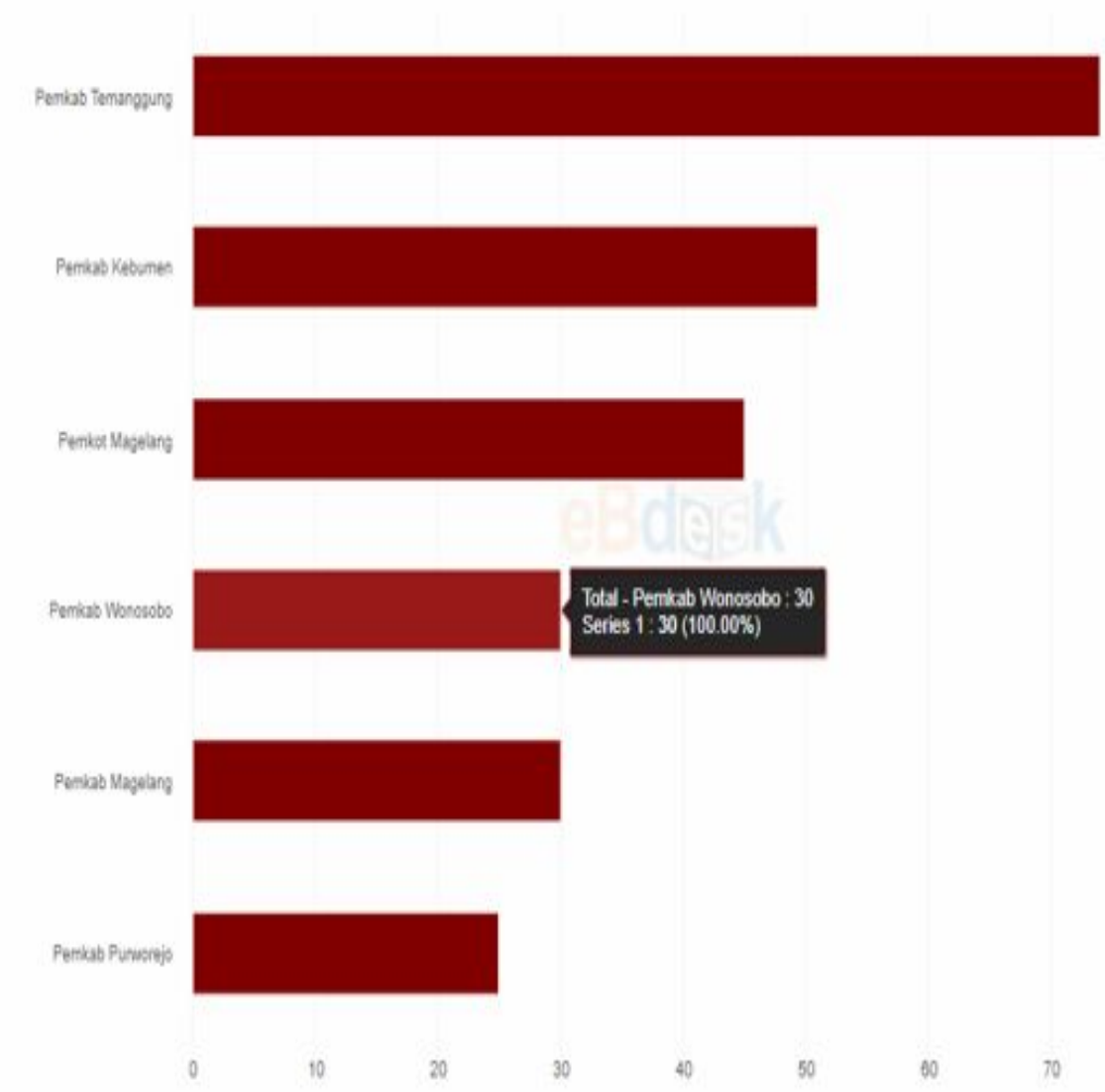
PERBANDINGAN PEMDA DI JATENG



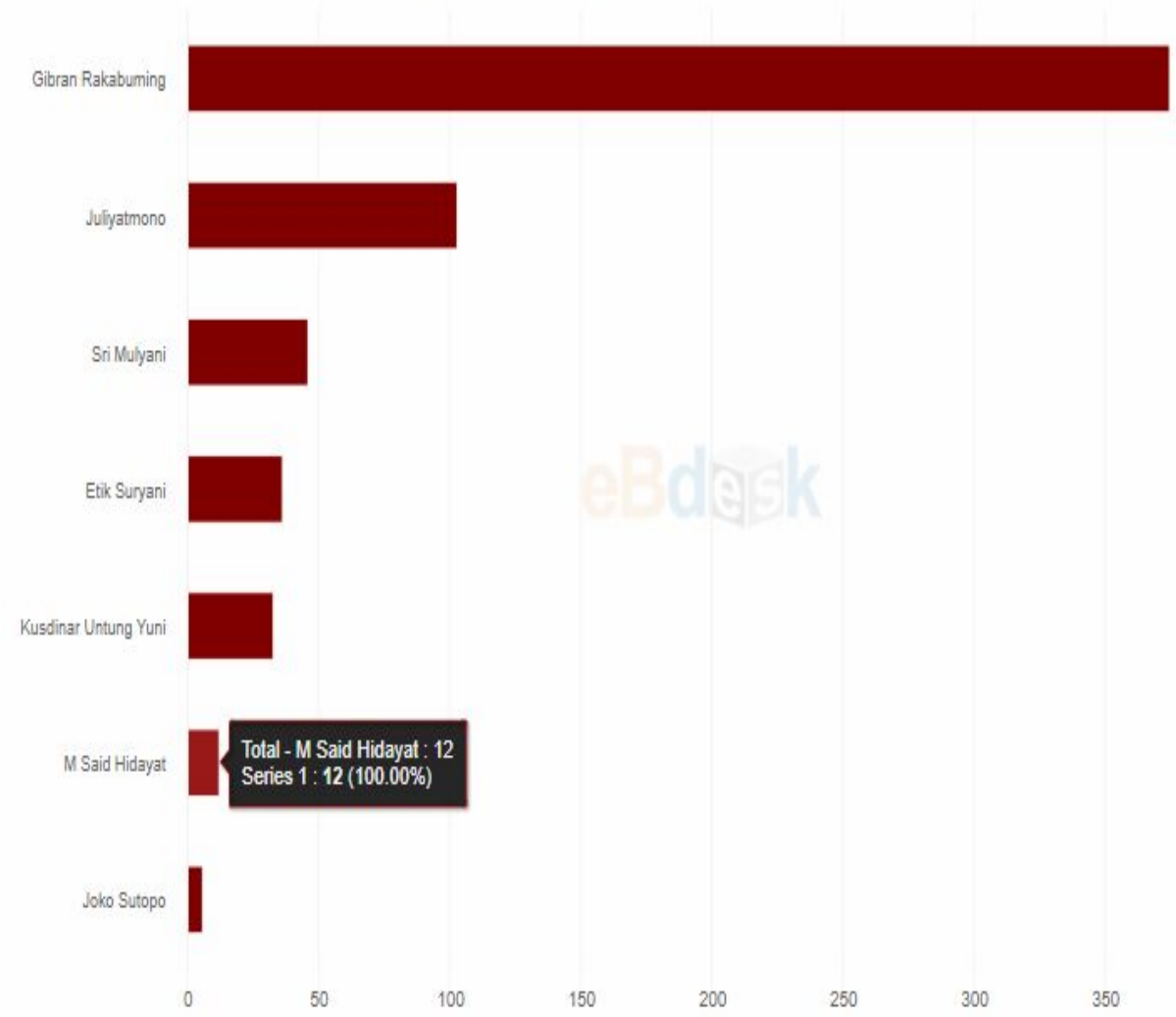
PEMERINTAH KARESIDENAN SURAKARTA



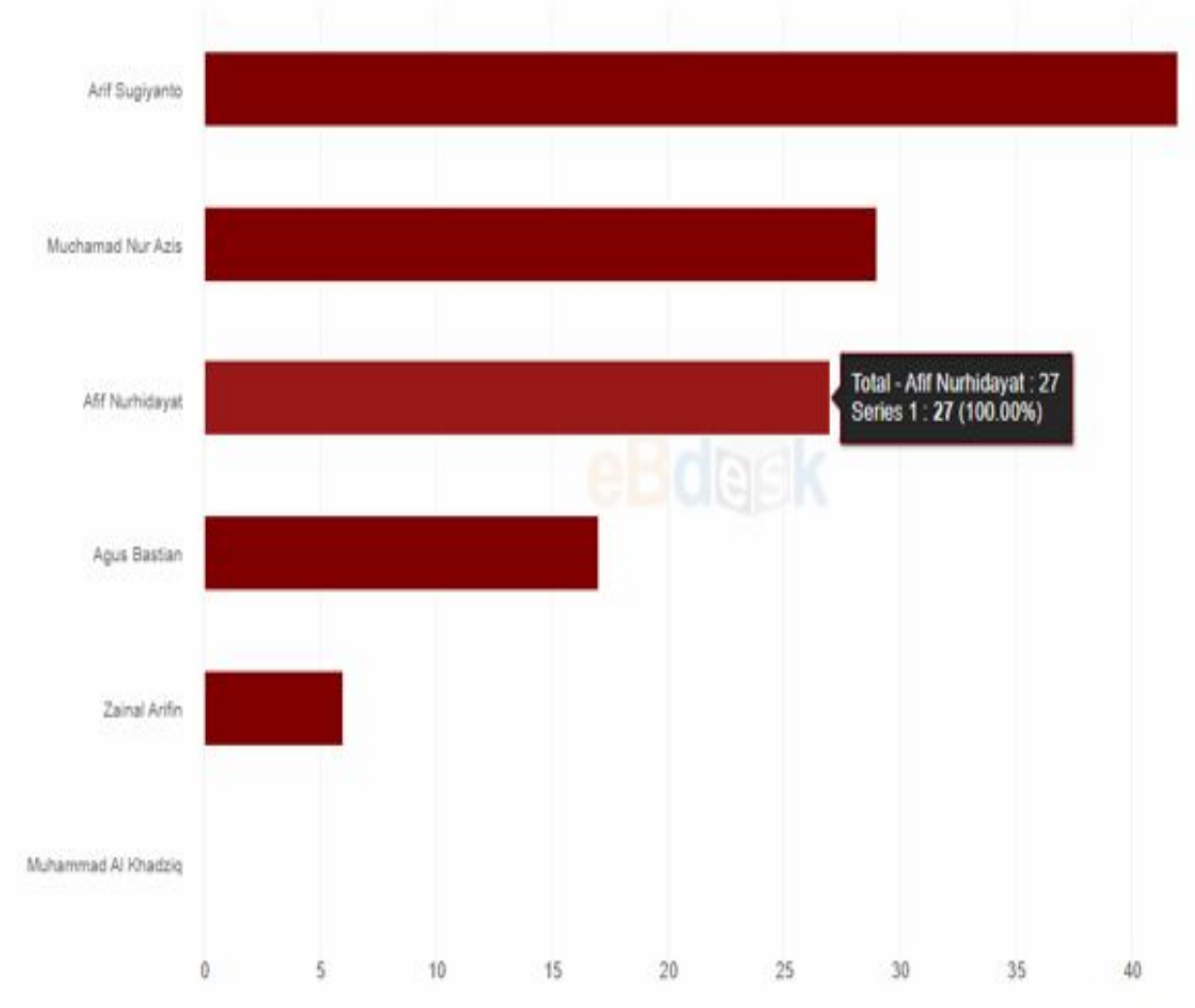
PEMDA KARESIDENAN KEDU



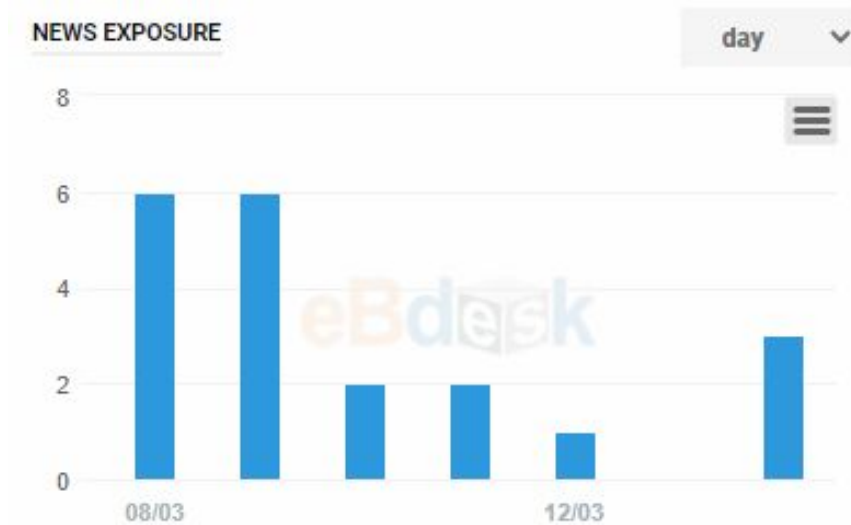
KEPALA DAERAH PEMERINTAH KARESIDENAN SURAKARTA



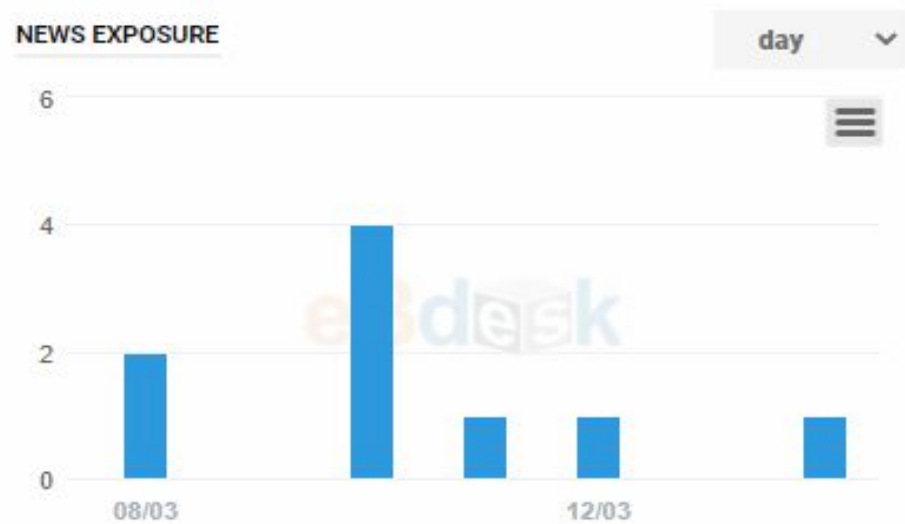
KEPALA DAERAH EKS KARESIDENAN KEDU



Ekspos Pemkab Boyolali di Media Online



Ekspos Pemkab Wonogiri di Media Online



Pemkab Kembali Siapkan Gedung PGRI sebagai Isoter

1

Dinsos Tambah 1.011 KPM Penerima Bansos 2022

1

Wacana Watu Cenik dan Puncak Joglo Diambil Alih Pemkab Wonogiri

1

Dinkop UKM Perindag Gelar Operasi Minyak Goreng

1

EKSPOS WILAYAH & KEPALA DAERAH



BUPATI WONOGIRI



PEMKAB WONOGIRI

Tanggapi soal Dirinya Dilaporkan Kades Karangtengah ke Polresta Solo

1

Mengatakan Pemkab Dapat Sewaktu-waktu Mengaktifkan Isoter Gedung PGRI

1

*Ntotal: 6
**Na: 2

Pemkab Kembali Siapkan Gedung PGRI sebagai Isoter

1

Dinsos Tambah 1.011 KPM Penerima Bansos 2022

1

Wacana Watu Cenik dan Puncak Joglo Diambil Alih Pemkab Wonogiri

1

Dinkop UKM Perindag Gelar Operasi Minyak Goreng

1

Pemberitaan Masalah Pemkot Surakarta

No.	Masalah	Respons
1.	<u>Satu tahun pimpin Surakarta, politikus PKS sebut Gibran-Teguh belum tunjukkan sinergitas.</u> https://bit.ly/3tdKBBb	Belum direspons pimpinan.
2.	<u>Survei Unisri, 21% warga Solo tak puas dengan kepemimpinan Gibran.</u> https://bit.ly/3tdtrmi	Sudah direspons wali kota. https://bit.ly/3tdNguG
3.	<u>Lima serikat pekerja di Solo minta Gibran sampaikan protes aturan JHT ke Kemnaker.</u> https://bit.ly/3ia9EOZ	Sudah direspons wali kota, namun exposure masih minim dan angle pemberitaan masih cenderung soal masalah. https://bit.ly/3ia9EOZ
4.	<u>Pengamat pariwisata meminta pemerintah menyesuaikan aturan perizinan indekos di Solo yang mirip hotel.</u> https://bit.ly/3w43tUY	Sudah direspons Kabid Promosi Pariwisata Disbudpar. https://bit.ly/3CGq2At
5.	<u>Harga kedelai naik, perajin tahu alami penurunan keuntungan.</u> https://bit.ly/3JcSEn7	Sudah direspons Disdag, namun isu kenaikan harga kedelai masih terus muncul. https://bit.ly/36kivu1
6.	<u>Kasus Gibran dilaporkan dosen UNJ ke KPK atas dugaan pencucian uang.</u> https://bit.ly/3tX7Rm7	Belum direspons pimpinan.
7.	<u>Catatan PKS Solo satu tahun Gibran-Teguh: kritik kesejahteraan dan gaya komunikasi.</u> https://bit.ly/3JcmKXW	Sudah direspons wali kota. https://bit.ly/3MQab6X

Pemberitaan Masalah Pemkab Karanganyar

No.	Masalah	Respons
1.	<u>Seorang Istri di Karanganyar Dianiaya Suami Hingga Tewas</u> https://bit.ly/3w5S1rM	Belum ada respons yang dipublikasikan.
2.	<u>Harga Minyak Goreng di Pasar Jungke Masih Tinggi</u> https://bit.ly/3MNQKvB	Belum ada respons yang dipublikasikan.
3.	<u>Pasca Longsor, Warga Beruk Tunggu Alat Berat BPBD Tak Kunjung Datang</u> https://bit.ly/3wbPP22	Belum ada respons yang dipublikasikan.
4.	<u>Perbaikan Tanggul Jebol Sementara, Warga Perum Griya Mutiara Papahan Waswas Banjir</u> https://bit.ly/3lhORWa	Belum ada respons yang dipublikasikan.

Pemberitaan Masalah Pemkab Temanggung

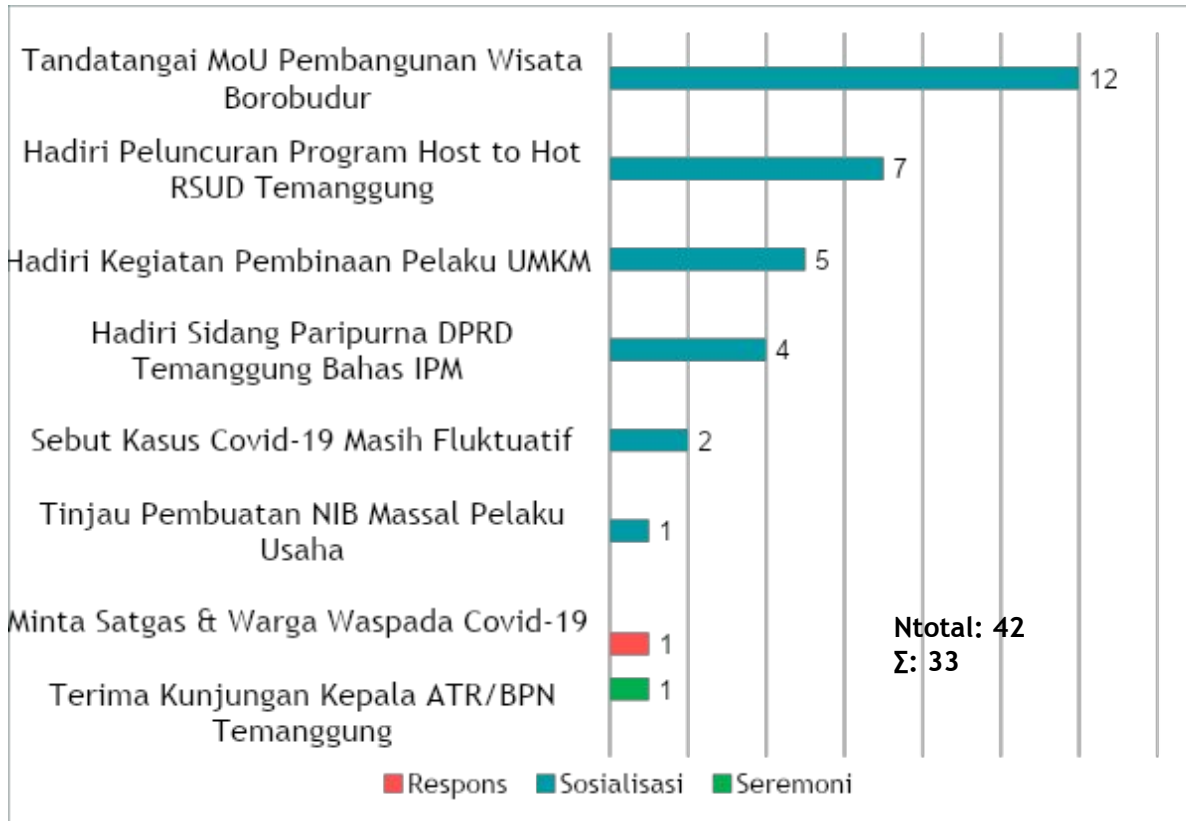
No.	Masalah	Respons
1	Bencana longsor landa Dusun Demangan. https://bit.ly/3tdzhVK	Belum ada respons yang dipublikasikan.
2.	Kelangkaan sejumlah bahan pokok terjadi di Pasar Kliwon Rejo Amertani menjelang ramadhan. https://bit.ly/3q5ZHxm	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Temanggung mengusulkan bantuan UMKM menjelang Ramadhan. https://bit.ly/3CMmht5
3.	Kasus Covid-19 di Kabupaten Temanggung belum menunjukkan tren penurunan. https://bit.ly/3i8Bnjd	Respons bupati belum menjawab permasalahan. https://bit.ly/3CJz7lv

Pemberitaan Masalah Pemkab Kebumen

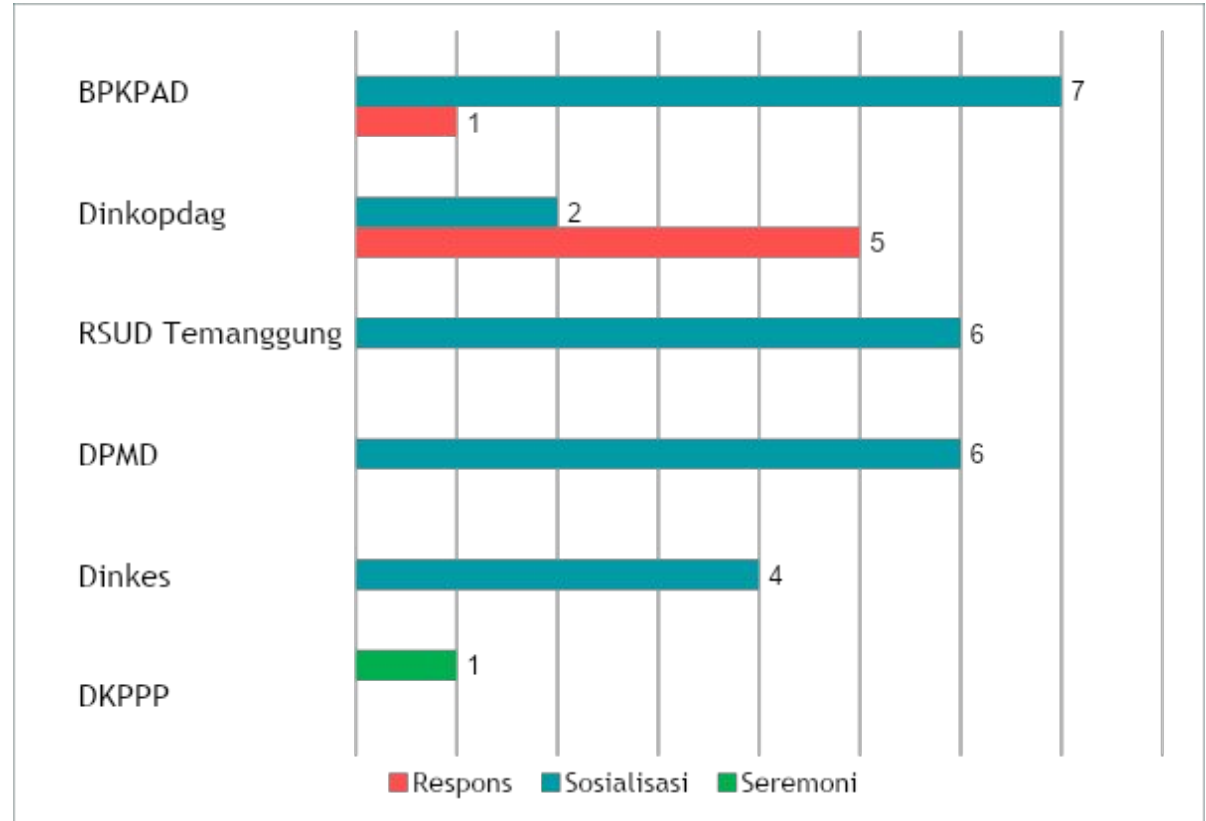
No.	Masalah	Respons
1	Kelangkaan Minyak Goreng di Kebumen https://bit.ly/3i757gf	Sudah Direspons Tapi Belum Menvelesaikan Masalah https://bit.ly/3i757gf
2.	36 Desa di Kebumen Dilanda Baniir https://bit.ly/3q40jLn	Respons BPBD Sudah Meniawab Masalah https://bit.ly/3q40jLn
3.	Warga Keluhkan Pembangunan Tambak Udang Berbasis Kawasan https://bit.ly/3MQg97I	Respons Bupati Sudah Meniawab Masalah https://bit.ly/3MQg97I

Framing Pemberitaan Pemkab Temanggung

BUPATI



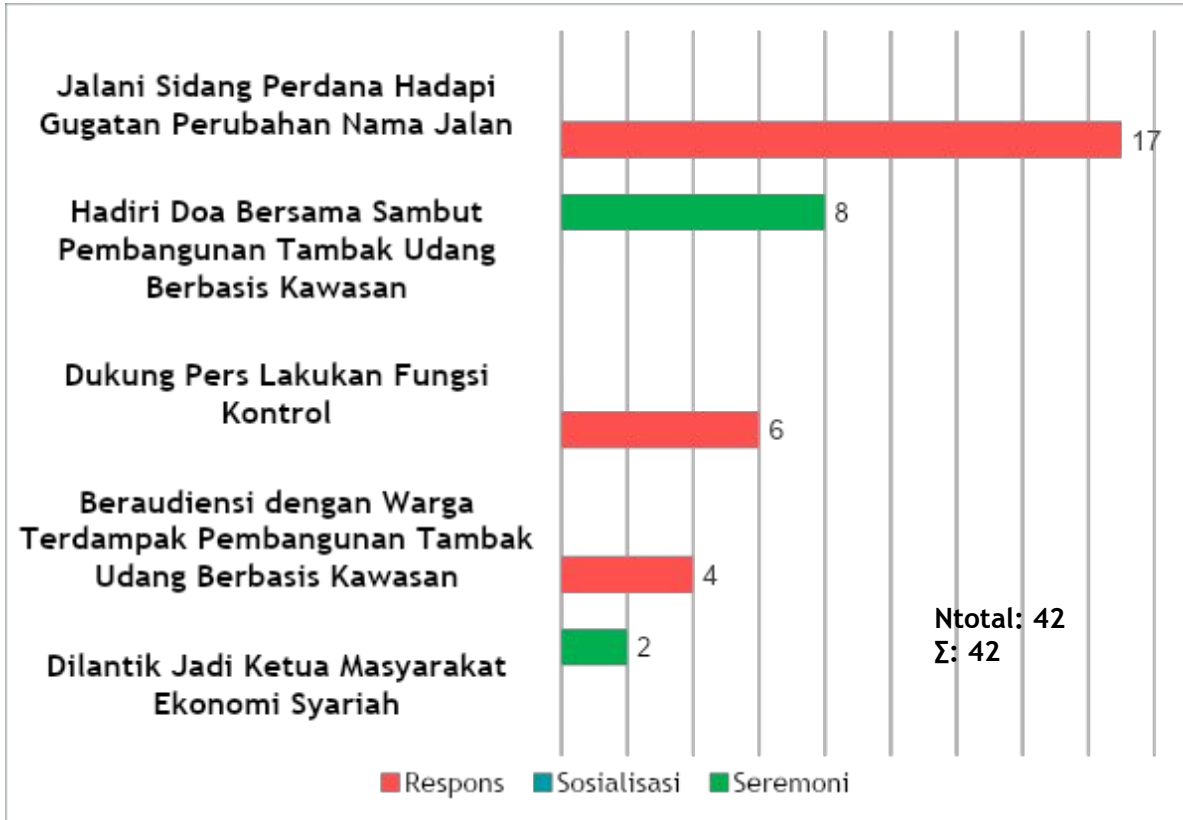
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



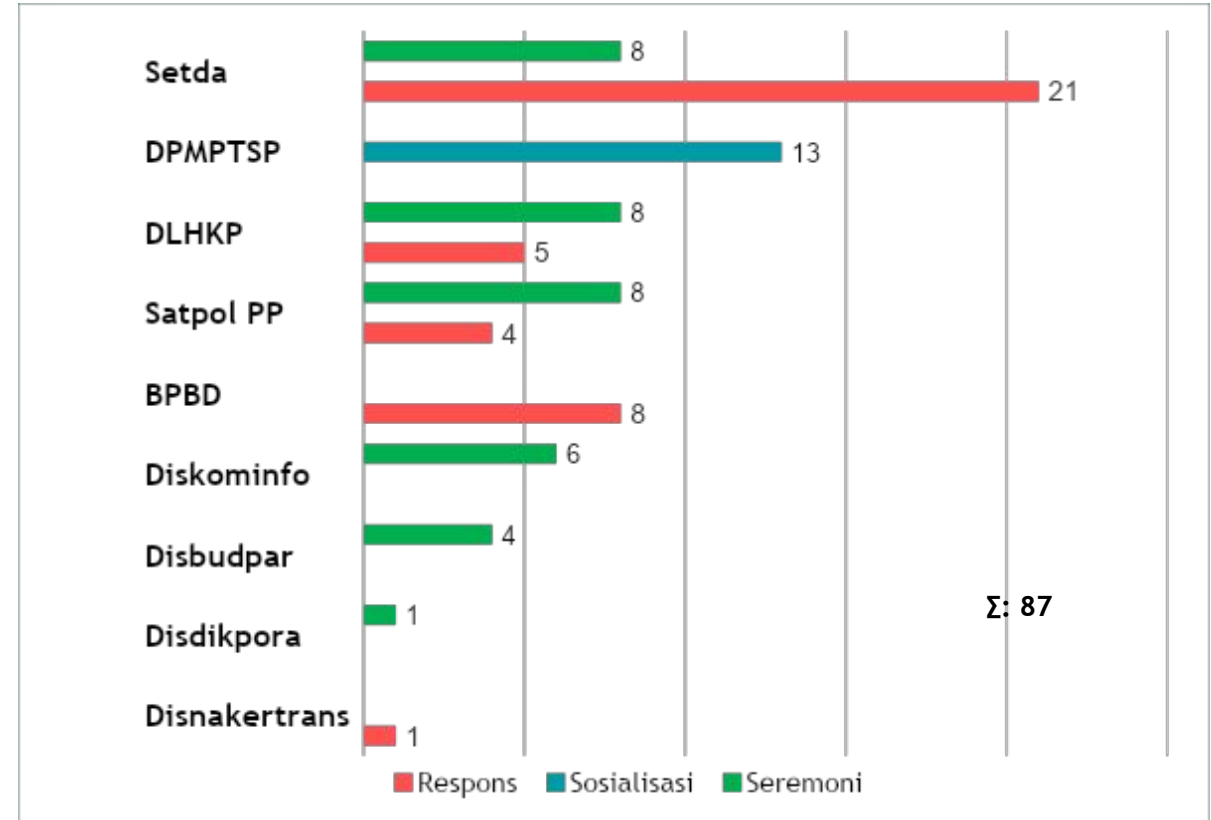
Pemberitaan Bupati Temanggung, HM. Al Khadziq didominasi oleh kegiatan Penandatanganan MoU Pemangunan Wisata Borobudur. Kategori isu tersebut merupakan Sosialisasi. Sementara itu, BKPAD mendominasi pemberitaan OPD pada topik Pemkab Temanggung dengan total 7 Ekspos sosialisasi dan 1 ekspos respons.

Framing Pemberitaan Pemkab Kebumen

BUPATI



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



Pemberitaan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto didominasi dirinya menjalani sidang perdana menghadapi gugatan perubahan nama jalan. Pemberitaan ini mendapat ekspos paling tinggi di media massa. Namun, pemberitaan mengenai kinerja bupati lainnya belum terpublikasi secara optimal. Sementara itu, Sekretariat Daerah (Setda) mendapat ekspos tertinggi di media massa, yakni Bagian Hukum Setda melakukan pendampingan hukum bagi bupati atas gugatan warga mengenai perubahan nama jalan. Bupati dan OPD sebaiknya dapat memublikasikan pemberitaan berbasis respons dan sosialisasi berbasis rencana kerja pemerintah daerah.